

# TANTANGAN PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK DI SURABAYA, JAWA TIMUR

Yani Paryono

Balai Bahasa Jawa Timur

Pos-el: [yani\\_coll@ymail.com](mailto:yani_coll@ymail.com), WA: 085770553688

**Abstraks:** *Pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik merupakan wajah dan sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Keberadaan maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat kita lebih memartabatkan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk sikap para pemangku kepentingan. Data penelitian pemakaian bahasa di ruang publik ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan diambil melalui teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan berupa nama bangunan, jalan, permukiman, merek dagang, lembaga, rambu lalu lintas, fasilitas umum, kain rentang, nama hotel, nama objek wisata, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bahasa yang digunakan pada ruang publik di Kota Surabaya terdiri atas beberapa macam, yaitu, a) bahasa Indonesia, b) bahasa Inggris, c) bahasa asing lainnya, d) bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, e) campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, f) bahasa Indonesia dan Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, g) bahasa Indonesia, Jawa, dan Inggris, h) bahasa Indonesia dan Inggris. Hasil penelitian yang diharapkan adalah deskripsi tantangan yang dihadapi dalam pemartabatan bahasa di ruang publik Kota Surabaya dan salah satu alternatif solusi dalam memartabatkan bahasa Indonesia di ruang publik.*

**Kata-kata kunci:** *bahasa, ruang publik, dan pemartabatan*

**Abstract:** *The use of Indonesian in the public space is the face and attitude of the community towards Indonesian as the state language. The existence of the rampant use of foreign languages in the public space is one proof that our society more memartabatkan foreign language compared with the Indonesian language in their own country. The use of Indonesian language in Surabaya City public space is influenced by various factors including the attitude of the stakeholders. The research data of language usage in public space is collected by using observation technique and taken by purposive sampling technique. The data collected in the form of names of buildings, roads, settlements, trademarks, institutions, traffic signs, public facilities, fabric range, hotel names, tourist names, and so forth. The results of this study indicate that (1) the language used in the public space in Surabaya City consists of several kinds, namely, a) Indonesian, b) English, c) other foreign languages, d) Indonesian and other foreign languages, e ) a mixture of Indonesian and Javanese, f) Indonesian and English, Indonesian and other foreign languages, g) Indonesian, Javanese, and English, h) Indonesian and English. The expected results are description of the challenges faced in language dignity in Surabaya City public spaces and one alternative solution in Indonesian language memartabatkan in public space.*

**Key words:** *language, public space, and dignity*

## PENDAHULUAN

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan kota bagi para pendatang dari berbagai sudut daerah di luar Kota Surabaya termasuk dari luar Pulau Jawa. Kota Surabaya sebagai pusat pemerintahan di Jawa Timur, juga merupakan pusat perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa. Oleh karena itu, Kota Surabaya

memiliki jumlah penduduk yang cukup besar kurang lebih sekitar tiga juta orang. Surabaya juga terkenal sebagai Kota Pahlawan karena sebagai tempat perjuangan para pejuang kemerdekaan bertempur mati-matian melawan penjajah Belanda mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia tepatnya pada tanggal 10 November 1945. Selain sebagai pusat pemerintahan di Jawa Timur dan sebagai pusat perdagangan, Kota Surabaya juga dikenal sebagai tujuan wisata pendidikan, wisata bahari, wisata sejarah dan wisata kuliner. Objek wisata pendidikan misalnya dapat dijumpai di pusat kota dengan Tugu Pahlawan, sebagai tempat untuk memperingati pertempuran 10 November 1945. Di Tugu Pahlawan terdapat museum yang menampilkan berbagai foto-foto perjuangan masyarakat Surabaya melawan penjajah Belanda. Selain Tugu Pahlawan, wisata pendidikan juga dapat ditemui pada Monumen Kapal Selam KRI Pesopati 410 tahun 1952 untuk memperingati pertempuran pembebasan Irian Barat dari penjajah Belanda. Selain kedua objek tersebut juga dapat dijumpai Rumah Batik di Tambak Dukuh yang menyediakan proses membatik dan berbagai macam batik yang berasal dari daerah Sumenep, Pamekasan, Surabaya, Magetan, Tulungagung, Sidoarjo, Malang dsb.

Wisata Bahari dapat dijumpai di Tanjung Perak tepatnya di Terminal Gapura Surya Nusantara lantai 2 dan 3 yang dikenal dengan Surabaya North Quay untuk melihat pemandangan laut yang sangat indah dan dipenuhi berbagai kapal-kabul besar. Adapun objek wisata sejarah dapat dijumpai juga di Tugu Pahlawan, Jembatan Merah, Monumen Jenderal Soedirman, Monumen Kapal selam, Museum Mpu Tantular, Gedung Negara Graha, Hotel Majapahit, Gedung Siola, Gedung Pertamina, dan Gedung BNI.

Adapun wisata kuliner hampir tersebar di pusat-pusat perbelanjaan Surabaya dan sudut-sudut kota seperti yang cukup terkenal seperti Nasi Goreng Janjuk, Es krim Zangrandi, Sate Klopo Ondomohen, Soto Ayam Lamongan, Lontong Balap, Rawon Setan Mba Endang, Depot Bu Rudi dsb. Selain itu, wisata belanja yang cukup terkenal seperti Tunjungan Plaza, Pasar Atom, DTC, Pusat Perbelanjaan Jembatan Merah dan sebagainya.

Sebagai pusat perdagangan, Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur juga menyediakan wisata kuliner yang menyajikan berbagai menu makanan, misalnya menu kuliner tradisional Jawa Timur, menu nusantara, maupun menu mancanegara. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila penggunaan bahasa asing di tempat-tempat pusat perbelanjaan di Kota Surabaya sangat banyak. Untuk menarik pengunjung atau pembeli, para pengusaha kuliner tersebut gencar mempromosikan usahanya melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Bahasa yang digunakan oleh sebagian besar para pengusaha menggunakan bahasa asing di samping bahasa Indonesia dan daerah. Sebagian besar pengusaha kuliner beranggapan bahwa menggunakan bahasa asing dalam bisnis kuliner dapat lebih menarik pembeli atau pengunjung, bahasa asing dianggap lebih bermartabat dan dapat menunjukkan status sosial yang tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik setiap tahun senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan sikap masyarakat terhadap pemakaian bahasa negara dan kemajuan teknologi informasi sebagai media komunikasi yang dipakai masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak lain senantiasa berubah ke arah yang lebih praktis, komunikatif, dan inovatif. Oleh karena itu, pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik juga tidak lepas dari perkembangan sikap pemakai bahasa negara dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih dan berakibat tumpang tindihnya penggunaan bahasa di ruang publik antara bahasa negara, bahasa asing, dan bahasa daerah dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tentu sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 38 butir (3) dan (4) yang menyatakan bahwa "Bahasa Indonesia **wajib** digunakan untuk **nama** bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan,

organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia” dan (4) “Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) **dapat** menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan”.

Ketentuan itu, juga sangat sesuai dengan isi Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Hal itu, berarti bahwa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara wajib diutamakan di atas bahasa daerah dan bahasa asing baik di ruang publik maupun dalam urusan kenegaraan di Indonesia.

Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik wajib diutamakan walaupun kenyataannya ruang publik di kota-kota besar sudah banyak dibanjiri berbagai bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa campuran asing-Indonesia, dan bahasa asing-daerah. Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti pada nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Fenomena membanjirnya bahasa asing di ruang publik juga merupakan cerminan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Fenomena maraknya pemakaian bahasa asing di ruang publik perkotaan juga merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat kita lebih memartabatkan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Penelitian penggunaan bahasa di ruang publik sebenarnya sudah banyak dilakukan para penulis sebelumnya, antara lain 1) *Keberadaan out Door Sign di Kawasan Wisata Kuta (Kajian Linguistik Landscapes)* oleh Artawa dan Mulyawan (2015) menjelaskan tentang wilayah Kuta sebagai wilayah pariwisata memiliki banyak *out door sign* yang secara global telah dimengerti dan mampu menjadi dasar komunikasi dalam komunitas pariwisata. Jenis tanda yang ditemukan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tanda komersial dan tanda nonkomersial. Jumlah tanda komersial mencapai 71,11% dan tanda nonkomersial hanya 28,89% dari tanda yang ada. Bentuk tampilan tanda sangat bervariasi dari bentuk yang paling sederhana dan kecil yaitu berupa nama toko dan jalan hingga tanda yang sangat besar berupa papan reklame (billboard). Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa Bali telah terpinggirkan oleh ekonomi kapitalis global yang menyebabkan erosi budaya lokal. Untuk menanggapi rasa takut kehilangan identitas sebagai orang Bali, gerakan Ajek Bali muncul, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk melestarikan identitas budaya masyarakat Bali yang telah berada di bawah pengaruh globalisasi; 2) *Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital* oleh Pambayun (2017) menjelaskan tentang pemunculan media baru internet yang menyebabkan perubahan budaya dan transformasi ruang publik sebagai wadah berskala besar yang menjadi titik perhatian untuk melihat bagaimanakah bentuk dan karakter serta permasalahan di ruang publik di era digital. Penelitian ketiga berjudul *Pemgunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta*, Muqri, dkk. (2016) menjelaskan tentang penggunaan bahasa pada papan nama yang memiliki bentuk dan makna tertentu. Pemakaian bahasa pada papan nama di ruang publik tersebut menggunakan satuan sintaksis tataran kata dan frasa, sedangkan tataran klausa dan kalimat tidak ditemukan.

Penelitian lainnya adalah *Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta* oleh Hendrastuti, dkk.(2015) menjelaskan bahwa penyimpangan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik Kota Surakarta sangat beragam. Penyimpangan yang ditemukan dalam pemakaian bahasa di ruang publik Kota Surakarta tersebut antara lain berupa penyimpangan kaidah bahasa yang meliputi kesalahan pemakaian kaidah ejaan, diksi, dan struktur. Kesalahan pemakaian bahasa di ruang publik tersebut disebabkan oleh

faktor kesengajaan pemakai bahasa dan faktor terbatasnya pengetahuan pemakai bahasa di ruang publik.

Dari keempat penelitian tersebut tidak ada satu pun yang menelaah tentang penggunaan bahasa di ruang publik Kota Surabaya. Menyikapi hal demikian, penulis ingin mencoba memaparkan bagaimanakah tantangan pemertabatan bahasa di ruang publik Kota Surabaya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan mendeskripsikan solusi yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan cara membuat kebijakan strategis pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat dalam pemertabatan bahasa Indonesia secara terarah dan sistematis.

## **LANDASAN TEORI**

### **Kondisi Bahasa di Ruang Publik Surabaya**

Berbicara bahasa di ruang publik berarti berbicara tentang teori Lanskap Linguistik. Dalam teori Linguistik Lanskap yang dianggap gabungan teori Linguistik Terapan, Sosiolinguistik, Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Geografi Kultural menurut Landry dan Bouhis (1997) merupakan pemakaian bahasa untuk tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, nama bangunan pemerintah dalam kelompok daerah, wilayah, atau kota. Pendapat ini diperluas oleh Shohamy dan Gorter (2009) yang menyatakan bahwa Linguistik Lanskap merupakan bahasa dalam lingkungan, kata, dan citra yang dipajang di ruang publik dan menjadi pusat perhatian di suatu wilayah yang bertumbuh kembang pesat, sedangkan Armand, dkk. (2008) menggagas Linguistik Lanskap dengan istilah *environmental print*, yaitu perkotaan sebagai teks, artinya bahwa bahasa banyak dipakai di ruang publik wilayah urban, yaitu wilayah yang banyak menggunakan berbagai bahasa dan dianggap sebagai teks.

Kondisi di ruang publik Kota Surabaya banyak diwarnai dengan penggunaan bahasa campuran yang didominasi oleh penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Bila kita cermati, pemakaian bahasa di ruang publik perotaan Jawa Timur dapat diklasifikasikan menjadi tujuh objek pengutamaan bahasa di ruang publik. Objek pengutamaan bahasa negara dalam kegiatan ini adalah penggunaan bahasa di ruang publik oleh lembaga yang mewakili wajah bahasa di wilayah Kota Surabaya. Secara umum dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh kelompok yakni a) bahasa Indonesia, b) bahasa Inggris, c) bahasa asing lainnya, d) bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, e) campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, f) bahasa Indonesia dan Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, g) bahasa Indonesia, Jawa, dan Inggris, h) bahasa Indonesia dan Inggris.

Kesepuluh kelompok itu dapat ditemukan pada tujuh kelompok objek penggunaan bahasa di ruang publik. Ketujuh objek itu adalah:

#### 1) Tulisan Nama Lembaga dan Gedung

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama lembaga berbadan hukum Indonesia dan nama gedung utama yang terpampang di ruang publik di Kota Surabaya, Dari jumlah 200 data yang terkumpul, secara fisik tidak didominasi bahasa asing, jauh lebih banyak menggunakan bahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang baik dapat dikategorikan 72% terkendali tipe B, sedangkan yang 28% tidak terkendali karena didominasi bahasa asing.

#### 2) Tulisan Nama Sarana Umum

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada sarana (tempat parkir, ruang tunggu, kantin, dana lain-lain) yang dapat dipakai oleh masyarakat umum yang ikut serta melaksanakan fungsi lembaga di Kota Surabaya terkumpul 200 data. Dari jumlah 200 data yang terkumpul, secara fisik tidak didominasi bahasa asing, jauh lebih banyak

menggunakan bahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang baik dapat dikategorikan 68% terkendali tipe B, sedangkan yang 32% tidak terkendali karena didominasi bahasa asing

3) Tulisan Nama Ruang Pertemuan

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat umum (nama aula, nama ruang rapat, balai sidang dan lain-lain). Dari jumlah 200 data yang terkumpul, secara fisik tidak didominasi bahasa asing, jauh lebih banyak menggunakan bahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang baik dapat dikategorikan 76% terkendali tipe B, sedangkan yang 24% tidak terkendali karena didominasi bahasa asing

4) Tulisan Nama Produk Barang/Jasa

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama dan label tertulis untuk produk barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama jasa boga, bahan publikasi, nama laman, buku, dan lain-lain). Dari data yang terkumpul 200 data, secara fisik masih didominasi bahasa asing sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah bahasa dan tipografi yang sangat kurang baik dapat dikategorikan sangat kurang terkendali 67%, dan 33 % cukup terkendali.

5) Tulisan Nama Jabatan

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor lembaga (tulisan jabatan atau ruangan pimpinan lembaga dan lain-lain). Dari 200 data yang terkumpul, secara fisik tidak didominasi bahasa asing, jauh lebih banyak menggunakan bahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang baik dapat dikategorikan 73% terkendali tipe B, sedangkan yang 27% kurang terkendali karena penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

6) Tulisan Penunjuk Arah atau Rambu Umum

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tulisan masuk, keluar, dilarang parkir, dan lain-lain). Data yang terkumpul 200 data. Secara fisik tidak didominasi bahasa asing, jauh lebih banyak menggunakan bahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang baik dapat dikategorikan 77% terkendali tipe B, sedangkan yang 23% kurang terkendali karena penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik

7) Tulisan Berbentuk Spanduk atau Alat Informasi Lain Sejenisnya

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, moto, atau informasi lain yang diketahui publik (ucapan selama datang, mptp, iklan, lembaga, dan lain-lain). Dari jumlah data yang terkumpul sebanyak 200 data. Secara fisik tidak didominasi bahasa asing, jauh lebih banyak menggunakan bahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang baik dapat dikategorikan 64% terkendali tipe B, sedangkan yang 36% tidak terkendali karena didominasi bahasa asing

### **Pemertabatan Bahasa**

Upaya memertabatan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun selalu dilakukan pemerintah ke arah yang lebih baik. Namun, di sisi lain usaha tersebut mendapat tantangan yang cukup

berat dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi, pasar bebas, dan akulturasi budaya. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat perlu mengantisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa untuk bersinergi mewujudkan dan mengangkat kembali fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan.

Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah dalam usaha pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah dengan hadirnya Kurikulum 2013 yang saat ini sedang dievaluasi. Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia mendapat tempat yang sangat strategis dan menjadi pusat integrasi dari mata pelajaran IPA dan IPS dan menjadi penghela berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia akan berbasis teks yang menjadi paradigma perubahan bahasa. Bahasa Indonesia diharapkan dapat memperkuat jati diri anak bangsa. Dengan implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia akan sangat dihargai dan secara sistematis akan menjadikan bahasa Indonesia lebih bermartabat di negeri sendiri.

Sejalan dengan itu, keberadaan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media

Keberadaan bahasa Indonesia semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan adalah sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Pertimbangan tersebut memperkuat (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007 tentang kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia di daerah sekaligus melakukan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah dan surat menyurat resmi.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Secara umum memiliki 9 bab dan 74 pasal, yang mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Khusus pengaturan bahasa terdapat pada Bab III Pasal 25 yang berisi tentang ketentuan umum bahasa Indonesia dan terdiri atas 3 ayat. Bagian kedua berisi 24 pasal (Pasal 26—40) yang berisi penggunaan bahasa Indonesia. Bagian ketiga berisi tiga pasal, yakni Pasal 41—43 yang berisi tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa. Bagian keempat berisi satu pasal, yakni Pasal 44 yang mengatur peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Adapun pasal 45 merupakan pasal terakhir yang undang-undang kebahasaan yang mengatur tentang lembaga bahasa.

Secara umum, pembuatan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 setidaknya memiliki tiga tujuan utama yakni, untuk (1) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3)

menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Yang dimaksud pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Istilah pembinaan bahasa dalam peraturan ini adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Adapun perlindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Oleh karena itulah, keberadaan bahasa Indonesia di mancanegara mulai diperhitungkan. Kita patut bangga sedikit bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah diajarkan di berbagai negara di dunia. Tercatat lebih dari 46 negara lebih di dunia yang mengajarkan bahasa Indonesia, baik di kawasan Asia, Australia, Amerika, Afrika, Eropa, maupun Timur Tengah. Dari ke-46 negara yang dimaksud, bahasa Indonesia terbanyak diajarkan di Australia dan Jepang. Di Australia bahasa Indonesia merupakan bahasa asing keempat yang disejajarkan dengan bahasa Mandarin, Perancis, Jepang, dan Belanda. Di Australia terdapat lebih dari 500 lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan siswa kelas 6 sekolah dasar sudah banyak yang berbahasa Indonesia secara lancar. Lembaga penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia itu pada umumnya adalah perguruan tinggi. Di samping itu, ada pula yang berupa lembaga kursus dan lembaga kebudayaan.

Lembaga penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia itu telah ada 279, dan ini akan terus bertambah pada masa-masa yang akan datang. Kenyataan menunjukkan, selain digunakan di Indonesia dengan jumlah penutur sekitar 200 juta orang, bahasa Indonesia juga dipahami oleh penutur bahasa Melayu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan di beberapa tempat lain. Hal itu mengantarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dengan jumlah penutur terbesar ke-5 di dunia setelah Cina, Inggris, India, dan Spanyol.

Masalah sastra dalam Kebijakan Bahasa Nasional memperoleh perhatian yang sama dengan bahasa sehingga keduanya harus dipandang sebagai dua sisi mata uang yang kadar kepentingannya sama. Itulah sebabnya rumusan tentang sastra dalam Kebijakan Bahasa Nasional menjadi eksplisit. Dengan demikian ada enam komponen yang saling menjalin dalam Kebijakan Bahasa Nasional, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing pada satu pihak serta sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing pada pihak lain ( Alwi, 2011: viii)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian adalah bahasa tulis yang berupa satuan lingual yakni kosakata dalam kalimat pada pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik Kota Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemakaian bahasa Indonesia yang ditulis pada nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang diperoleh pada bulan April 2018.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Kata “dokumen”, digunakan untuk mengacu pada setiap tulisan atau bukan selain “rekaman”, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, naskah editorial surat kabar, catatan kasus, skrip televisi, dan foto-foto, Syamsudin dan Vismaia dalam Sukarnoto, (2012). Sesuai dengan pengertian ini, semua tulisan yang terdapat dalam ruang publik dan tercantum pada papan nama, nama rambu-rambu umum, nama gedung, petunjuk jalan, dsb. dapat dianggap sebagai dokumen. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif sebagai konsekuensi dari penelitian yang bersifat kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah paradigma metodologis induktif, paradigma yang berangkat dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Teknik penyajian data disajikan dengan formal dan informal, yaitu berupa tanda-tanda yang menjelaskan hasil dari analisis data dalam penelitian ini dan berupa kata-kata biasa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Pemertabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik**

Persoalan pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan persoalan yang kompleks. Oleh karena itu perlu penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua komponen bangsa. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pemertabatan bahasa di ruang publik Kota Surabaya antara lain.

- a) Sikap bahasa para pemakai bahasa di daerah termasuk para pejabat daerah yang tidak positif terhadap bahasa Indonesia sehingga mengakibatkan pemakaian bahasa di ruang publik tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemakai bahasa dalam hal ini dapat berkaitan dengan sikap positif masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang semakin menipis karena tuntutan berbagai kepentingan di era global. Pengabaian kaidah bahasa Indonesia oleh pemakai bahasa juga dapat disebabkan oleh tekanan waktu dalam menulis, kemasabodohan akibat malas berpikir, tidak mau mengikuti petunjuk penggunaan kaidah bahasa yang berlaku, ikut-ikutan mengikuti istilah yang sedang tren, dan belum optimalnya wawasan kebahasaan para pemakai bahasa.
- b) Lemahnya koordinasi antarlembaga di daerah yang disebabkan oleh persepsi yang beragam, belum ada kesepakatan tentang pentingnya pemertabatan bahasa di ruang publik sebagai bahasa negara;
- c) Para pemangku kepentingan di daerah masih memprioritaskan program-program unggulan yang bernilai ekonomis demi kesejahteraan rakyatnya;
- d) Belum ada koordinasi dan kerja sama kegiatan kebahasaan dan kesastraan pemerintah dan media massa yang konkret dalam pemertabatan bahasa di ruang publik;
- e) Belum semua aparat pemerintah di daerah memiliki buku acuan/petunjuk pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamakan penggunaan bahasa negara;
- f) Dimungkinkan ada kesenjangan sistem informasi manajemen pemerintahan sehingga informasi yang diperlukan tidak sampai kepada instansi/lembaga yang memiliki kompetensi yang memadai.
- g) Lemahnya untuk sebagian badan/lembaga dan masyarakat terhadap prakarsa (inisiatif) penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hal ini dapat dipahami karena sebagian masyarakat berpandangan bahwa penguasaan bahasa Indonesia tidak menjajikan nilai ekonomi untuk mengubah kesejahteraan hidupnya. Akibat yang terjadi adalah masyarakat lebih suka mempelajari basa asing untuk kepentingan ekonomi yang lebih menjanjikan.

- h) Tidak adanya sanksi tegas dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan sebagai acuan untuk pemertabatan bahasa di ruang publik.
- i) Belum ada perda penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

### **Beberapa alternatif Memertabatkan abahasa Indonesia di Ruang Publik Surabaya**

Permasalahan pemertabatan bahasa sebenarnya adalah persoalan yang cukup kompleks karena berkaitan dengan pemakai bahasa dan pemakaian bahasa. Berkaitan dengan kaidah bahasa, baik di bidang ejaan, kosakata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Berkaitan dengan pemakai bahasa, sikap positif masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia semakin menipis karena tuntutan berbagai kepentingan di era global. Pengabaian kaidah bahasa Indonesia oleh pemakai bahasa juga dapat disebabkan oleh tekanan waktu dalam menulis, kemasabodohan akibat malas berpikir, tidak mau mengikuti petunjuk penggunaan kaidah bahasa yang berlaku, ikut-ikutan mengikuti istilah yang sedang tren, dan belum optimalnya wawasan kebahasaan para pemakai bahasa.

Namun demikian, perlu ada langkah-langkah yang konkret dari pemerintah antara lain:

- a. Pembuatan kebijakan pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia yang berisi pemerintah perlu mengeluarkan peraturan presiden yang mewajibkan para pemegang kepentingan wajib ikut bertanggung jawab dalam pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik.
- b. Pemerintah perlu membuat pusat informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan unsur-unsur insan media massa yang berfungsi sebagai pusat informasi dan kegiatan kebahasaan dan kesastraan di bawah koordinasi balai/kantor bahasa tingkat provinsi.
- b) Pemerintah melalui Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat kebijakan yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan pemertabatan di ruang publik dan badan publik;
- c) Kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia dan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia di badan publik dan di ruang publik perlu diintensifkan dengan melibatkan semua pemegang kepentingan di daerah.
- d) Pemerintah perlu menambah alokasi dana untuk kegiatan pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia yang dipelopori balai/kantor bahasa di daerah bekerja sama dengan bupati/wali kota dengan melibatkan semua unsur masyarakat.
- e) Pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap calon ASN, Calon Anggota TNI/Polri wajib mahir berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan hasil Uji kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI),
- f) Pemerintah perlu membuat peraturan yang mewajibkan semua tenaga kerja asing di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.
- g) Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas terkait dengan perizinan pendirian lembaga-lembaga/badan-badan komersial maupun nonkomersial wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- h) Semua kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati/walikota diwajibkan ikut bertanggung jawab dan terlibat langsung mengimplementasikan UU RI Nomor 24 tahun 2009 tentang kebahasaan kepada semua komponen masyarakat, terutama kepada media massa baik cetak maupun elektronik;
- i) Pemerintah daerah perlu menerbitkan perda yang mengatur pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah sebagai acuan dalam pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia dengan melibatkan unsur insan media massa sebagai pelopor kegiatan kebahasaan dan kesastraan Indonesia;
- j) Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan membantu pendanaan organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan seperti MLI, HPBI, dan MGMP, dan KKG yang bekerja sama

dengan media massa dalam melaksanakan kegiatan pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia

## **PENUTUP**

Pemakaian bahasa di ruang publik Kota Surabaya secara umum dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh bahasa yakni: a) bahasa Indonesia, b) bahasa Inggris, c) bahasa asing lainnya, d) bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, e) campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, f) bahasa Indonesia dan Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, g) bahasa Indonesia, Jawa, dan Inggris, h) bahasa Indonesia dan Inggris. Adapun objek pemakaian bahasa di ruang publik di Kota Surabaya meliputi di tulisan nama lembaga dan gedung, tulisan nama sarana umum, tulisan nama jabatan, dan tulisan pada petunjuk arah atau rambu umum dapat dikategorikan secara fisik tidak didominasi bahasa asing, jauh lebih banyak menggunakan bahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang baik dapat dikategorikan 68% terkendali tipe B, sedangkan yang 32% tidak terkendali karena didominasi bahasa asing. Namun, tulisan pada objek tulisan nama ruang pertemuan, tulisan produk jasa, tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lainnya secara fisik masih didominasi bahasa asing dan sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah bahasa dan tipografi yang sangat kurang baik dapat dikategorikan sangat kurang terkendali 67%,

Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai hambatan dalam pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik, salah satu alternatif solusinya adalah dengan cara ngoptimalkan semua komponen bangsa terlibat langsung dalam upaya pemertabatan bahasa di ruang publik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono, 2000. *Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Artawa, Ketut. 2013 “Pertarungan antara Teks Ideal dan Teks Sosial”. Makalah Seminar “language Maintenance dan Shift III”, Semarang , 2-3 Juli 2013.
- Artawa, Ketut dan I Wayan Mulyawan. 2015. *Keberadaan Out Door Sign di Kawasan Wisata Kuta ( Kajian Linguistik Landscapes)*. Denpasar: Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Gorter, Durk. 2006. *Further Possibilities for Linguistic Landscape Research*. Clevedon: Multi Lingual Matters Ltd.
- Hendrastuti, Rekto. 2015. *Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta*. Kendari: Jurnal Kandai, Vol. 11 No 1 Mei 2015.
- Landry, Rodrigue and Bourhis, Richard Y. 1997. *Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study*. Journal of Language and Social Psychology 16, 23-49
- Muqri, Mutia dkk. 2016. *Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Jalan Protokol Jakarta*. Jakarta: Jurnal Arkhais, Vol 7, No. 2 Juli—Desember 2016.
- Pambayun, Jaduk Gilang. 2017. *Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital*. Magelang: Jurnal Komunitas dan Kajian Media, Vol. I, No. 1 Oktober 2017.
- Shohamy, Elena and Durk Gorter (eds). 2009. *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*. New York: Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud.

